



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GANY CIPTA SAMPURNA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PERBENGKELAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN
3. NHK : 717916

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 385.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/72 m² di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/72 m² di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 87.500.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ GD3 1.5 IDSI MT / MPNP / MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 3C1 V-IXION Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.750.000
3. MOTOR, HONDA AC82J2MBO2 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.750.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.850.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 3.788.702**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 486.138.702**III. HUTANG** Rp. 314.146.104**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 171.992.598

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.